

**RANGKUL ABK: PROGRAM RINTISAN PENINGKATAN KOMPETENSI
PROFESIONAL GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA BINJAI
SUMATERA UTARA**

**Rafael Lisinus Ginting¹, Mirza Irawan², Erwita Ika Violina³, Asiah⁴,
Elizon Nainggolan⁵, Abdul Munir⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Medan / Medan, Sumatera Utara

Alamat Korespondensi: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

E-mail: ¹⁾ rafaellisinus@unimed.ac.id

Abstrak

Pada kegiatan pengabdian ini yang menjadi mitra adalah Forum Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Kota Binjai, Sumatera Utara. Forum ini sangat membutuhkan pendampingan terkait dengan permasalahan rendahnya kompetensi guru Bimbingan Konseling dalam mengidentifikasi, melakukan need assesment, dan merancang program pembelajaran individual bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra yakni: 1) Terbatasnya akses untuk mendapatkan pelatihan mengenai pembelajaran anak berkebutuhan khusus; 2) Keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum; 3) Adanya keterbatasan guru dalam melakukan tindakan profesional sesuai kebutuhan siswa berkebutuhan khusus; dan 4) Tidak tersedianya panduan pelaksanaan layanan bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan metode workshop untuk peningkatan kompetensi profesional guru serta metode focus group discussion untuk pemanfaatan aplikasi rangkulabk sebagai bentuk inovasi sosial dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Keberhasilan pengabdian ini dapat diukur berdasarkan luaran yang dihasilkan antara lain: peningkatan keterampilan guru dalam mengidentifikasi dan mengukur kebutuhan siswa berkebutuhan khusus; guru memiliki panduan dalam modifikasi kurikulum untuk pengembangan program pembelajaran individu bagi siswa berkebutuhan khusus serta tersedianya program bimbingan konseling bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah.

Abstrac

In this community service activity, the partner is the Guidance and Counseling Teachers' Deliberation Forum of Binjai City, North Sumatra. This forum really needs assistance related to the problem of low competence of Guidance and Counseling teachers in identifying, conducting needs assessments, and designing individual learning programs for students with special needs in schools. There are several problems faced by partners, namely: 1) Limited access to training on learning for children with special needs; 2) The existence of students with special needs in public schools; 3) Limited teachers in carrying out professional actions according to the needs of students with special needs; and 4) The unavailability of guidelines for implementing guidance and counseling services for children with special needs in schools. The implementation of this community service is carried out using the workshop method to improve teacher professional competence and the focus group discussion method for utilizing the Rangkulabk application as a form of social innovation in the education of children with special needs. The success of this community service can be measured based on the outputs produced, including: improving teacher skills in identifying and measuring the needs of students with special needs; Teachers have guidance in modifying the curriculum for the development of individual learning programs for students with special needs as well as the availability of guidance and counseling programs for students with special needs in schools.

Kata Kunci: *Bimbingan Konseling di Sekolah; Kompetensi Guru BK; Rangkul ABK; Siswa Berkebutuhan Khusus*

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini adalah banyak orang yang terabaikan dan terdiskriminasikan dari partisipasi yang bermakna dalam masyarakat. Kelompok orang yang terabaikan dan terdiskriminasikan itu disebabkan adanya perbedaan yang mencolok dari kebanyakan orang, yang salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus. Sehingga jika diabaikan, mereka tidak akan dapat memperoleh kesempatan pendidikan seperti yang diperoleh kelompok lainnya atau anak pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak nyaman bagi keluarga dan individu anak berkebutuhan khusus yang terabaikan dan terdiskriminasi.

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin besar. Menurut data BPS tahun 2015 diperkirakan ada kurang lebih 5,7 juta jiwa ABK di Indonesia (Republika, 2018). Berdasarkan data BPS tahun 2018 ada 8,7 juta ABK di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan dari tahun ke tahun jumlah ABK semakin meningkat. Sebagian besar ABK belum mengenyam pendidikan. Berdasarkan UU No 20 tahun 2003, Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, dan warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Memperoleh pendidikan seperti yang diharapkan, tentu menjadi dambaan semua orang, tak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yaitu pendidikan yang kondusif dan inklusif. Pendidikan adalah wilayah yang menjunjung prinsip keadilan, bisa dimasuki siapa saja tanpa memandang identitas; karena pendidikan bersifat obyektif. Tidak dipungkiri masih banyak sekolah di Indonesia yang belum sepenuhnya mau menerima Anak Berkebutuhan Khusus dan menerapkan pendidikan inklusif.

Di Indonesia, istilah pendidikan inklusif mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2001 ketika pemerintah memulai proyek percontohan tentang pendidikan inklusif. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya yang sistematis untuk memajukan pendidikan inklusif, agar setiap anak dapat menikmati hasil dari pendidikan inklusif tersebut. Pendidikan yang diberikan oleh pendidik harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individu maupun kelompok.

Indonesia secara resmi mengakui pendidikan inklusif ketika parlemen pada tahun 2003 mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa semua warga negara dengan segala jenis disabilitas wajib untuk berpartisipasi dalam pendidikan inklusif. Pada tahun yang sama, pemerintah juga mengeluarkan keputusan tentang pendidikan inklusif untuk anak-anak dengan cacat kognitif dan fisik. Peraturan ini menetapkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menjamin akses yang sama bagi siswa dengan segala jenis kecacatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum bersama dengan siswa yang tidak cacat (Sunardi, 2015). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

Dalam pendidikan ini tidak hanya berfokus pada ketidakmampuan anak dalam memahami huruf atau angka, akan tetapi lebih terfokus kepada kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki mereka. Sebagaimana yang tertulis Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki bakat istimewa memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan bermutu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, serta tidak diskriminatif antara anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang normal.

Konsep pendidikan inklusif bertujuan untuk memasukkan anak-anak penyandang cacat ke dalam kelas reguler dimana guru harus menggunakan berbagai pendekatan pengajaran, bekerja secara kolaboratif, dan menggunakan berbagai metode penilaian. Keberhasilan penerapan pendidikan inklusif bergantung pada keberadaan sistem pendukung, yang meliputi pelatihan guru, sumber daya untuk sekolah, dukungan sosial, dan partisipasi masyarakat, diantaranya dengan mengembangkan hubungan

kolaboratif di antara staf dan dengan orang tua, serta hubungan kolaboratif dengan organisasi yang terlibat dalam masyarakat (Kantavong, 2017). Guru dan staf sekolah memiliki peran penting bagi keberhasilan implementasi dan keberlanjutan pendidikan inklusif. Orang tua dan masyarakat juga berperan penting untuk memfasilitasi pendidikan inklusif yang sukses (Forlin 2012; Sharma, Forlin, Deppeler & Yang, 2013). Pendidikan inklusif ialah program pendidikan yang mengakomodasi seluruh siswa dalam kelas yang sama sesuai dengan usianya dan perkembangannya (Schmidt dan Venet, 2014). Pendidikan inklusi juga membuktikan bahwa mendidik anak dengan kebutuhan khusus bersama dengan anak normal menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Pendidikan inklusif tidak dapat bekerja sendiri, dan pendidikan umum yang mengambil peran utama dalam pendidikan inklusif perlu didukung para pemangku kepentingan: kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Pelatihan yang sesuai untuk kepala sekolah, guru, dan asisten guru sangat diperlukan.

Eleweke dan Rodda (2002) menunjukkan bahwa selain guru dengan pendidikan khusus, keberhasilan pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif membutuhkan keterlibatan para profesional. Para profesional ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan identifikasi, memberikan rujukan, memberikan diagnosis dan layanan pendidikan yang sesuai. Ainscow, Howes, Farrell, & Frankham (2013) menunjukkan bahwa jaringan yang terbangun antara praktisi pendidikan inklusif dan akademisi di universitas lokal mampu menghasilkan kolaborasi yang sangat kuat sebagai sarana untuk membangun praktik pendidikan inklusif yang baik. Sistem sekolah reguler semakin ditantang untuk mempraktikkan pendekatan inklusif, meskipun tekanan dari dalam sekolah, asosiasi guru, dan masyarakat sering menghasilkan arah kebijakan yang ditentukan masing-masing sekolah (Forlin, 2012).

Pada kenyataannya, implementasi pendidikan yang inklusif memiliki banyak hambatan. Rousses (2015) menjelaskan adapun yang menjadi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif antara lain: (1) kurikulum yang tidak relevan, sistem penilaian dan pemeriksaan yang tidak tepat, dan dukungan guru yang tidak memadai, (2) hambatan lain termasuk sikap negatif masyarakat terhadap kelompok disabilitas dan kelompok marginal lainnya, (3) tabunya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan inklusif, (4) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, (5) fasilitas dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus, (6) kurangnya perhatian pemerintah terhadap sekolah berkebutuhan khusus, dan (7) terbatasnya pendanaan. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan inklusif seringkali menghadapi kendala karenasifatnya yang kompleks.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan sekolah inklusif perlu adanya integrasi antara seluruh pihak yaitu dari pihak sekolah seperti manajemen sekolah (kurikulum, sarana prasarana yang mendukung), guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, siswa, orangtua, masyarakat dan pemerintah, sehingga pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk kompetensi Profesional Guru BK/Konselor dalam pendidikan ABK adalah dengan melakukan pengabdian “Rangkul ABK : Program Rintisan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di Kota Binjai.

2. METODE PELAKSANAAN

Dengan permasalahan-permasalahan prioritas mitra sebagaimana digambarkan sebelumnya dan untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian ini, maka metode yang digunakan adalah metode pendidikan, pelatihan, praktik dan pendampingan. Adapun mekanisme pelaksanaannya ini diuraikan sebagai berikut.

Tahap I: Persiapan

1. Melakukan survey kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pihak MGBK SMA Kota Binjai
2. Pelaksanaan FGD dengan pihak MGBK SMA Kota Binjai dalam rangka menentukan jadwal kegiatan, waktu, tempat, dan jumlah peserta pendampingan
3. Mempersiapkan kelengkapan administrasi seperti surat izin pelaksanaan

kegiatan

4. Sosialisasi program pengabdian kepada seluruh guru BK/Konselor yang tergabung dalam MGBK Kota Binjai
5. Pelaksanaan diagnosis kebutuhan guru BK/ Konselor dalam peningkatan kompetensi profesional
6. Mempersiapkan kelengkapan program, dan penggunaan program rintisan sertamateri diskusi

Tahap II: Pelaksanaan

1. FGD Program “Rangkul ABK: Program Rintisan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif
2. Analisis data dan identifikasi serta pemantapan program “Rangkul ABK: program rintisan peningkatan kompetensi profesional guru bimbingan konseling dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif
3. Pemantapan program berkelanjutan terhadap Peningkatan kompetensi profesional Guru BK/Konselor
4. Penyerahan seperangkat Program, Instrumen dan program rintisan peningkatan kompetensi profesional kepada pihak sekolah

Tahap III: Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi program berkelanjutan
2. Finalisasi program dan laporan akhir kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan selama 2 (dua) kali pertemuan dalam bentuk sseminar, diskusi dan *workshop* berjalan dengan baik dan lancar. Pada setiap pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan dengan *workshop* (latihan/praktek). Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Rincian Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Materi Kegiatan	Narasumber	Waktu dan Tempat
1	FGD	Pengenalan Program Rintisan Rangkul ABK bagi Guru Bimbingan Konseling Kota Binjai	Rafael Lisnus Mirza Irawan Erwita Ika Violina, Asiah	21 Agustus 2024 / Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Binjai
2	Workshop dan Seminar	Identifikasi dan asesmen Anak Berkebutuhan Khusus: Pengenalan dan Penyusunan Instrumen Identifikasi dan Asesmen Kebutuhan ABK	Mirza Irawan Rafael Lisnus Erwita Ika Violina, Asiah	26 Agustus 2024 / Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Binjai

Pada kegiatan pertama yakni Pengenalan Program Rintisan Rangkul ABK bagi Guru Bimbingan Konseling Kota Binjai dilakukan seminar dan diskusi bersama 49 Guru BK Kota Binjai yang tergabung dalam Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Tingkat SMA se- Kota Binjai.

Adapun topik yang dibahas adalah Pengenalan Program Rintisan Rangkul ABK bagi Guru Bimbingan Konseling Kota Binjai. Beberapa hal yang dibahas dalam seminar dan diskusi ini adalah 1) pengenalan dan pemahaman mengenai siswa berkebutuhan khusus di sekolah yang meliputi ABK dengan gangguan fisik dan motorik, ABK dengan gangguan kecerdasan dan inteligensi, ABK dengan gangguan emosi dan perilaku, ABK dengan gangguan sensorik, dan ABK dengan bakat dan kecerdasan khusus di atas rata-rata, 2) pemahaman mengenai sistem pendidikan inklusi di sekolah. Sebelum seminar dan diskusi dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan *sharing session* dan pengarahan serta tanya jawab mengenai *run down* dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan workshop dan seminar dilakukan oleh para narasumber yang diikuti oleh para guru BK Kota Binjai. Narasumber memaparkan materi selanjutnya diadakan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta.

Pada kegiatan kedua, *workshop* Identifikasi dan asesmen Anak Berkebutuhan Khusus: Pengenalan dan Penyusunan Instrumen Identifikasi dan Asesmen Kebutuhan ABK dipaparkan materinya oleh tim pengabdian dan dibahas dan dikaji secara mendalam terkait dengan: ragam dan jenis anak berkebutuhan khusus, identifikasi anak berkebutuhan khusus, instrumen Identifikasi anak berkebutuhan khusus; asesmen anak berkebutuhan khusus; instrumen Asesmen anak berkebutuhan dan prosedur identifikasi dan asesmen.

Pada FGD dan workshop ini fokus pembahasan lebih diarahkan kepada pelaksanaan dan pemanfaatan hasil identifikasi dan asesmen sebagai dasar pengembangan pengembangan program pembelajaran individu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Pada awal perencanaan kegiatan target peserta adalah seluruh Guru BK di Kota Binjai yang dijadikan sasaran kegiatan kemitraan masyarakat. Pihak Mitra melalui Kordinator MGBK Kota Binjai mengharapkan seluruh Guru BK mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud. Setelah mendapatkan penjelasan dari tim PKM terkait dengan konsep kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan, Kordinator MGBK Kota Binjai sangat menyakini bahwa kegiatan ini sangat penting dan akan sangat baik jika semua Guru BK mendapatkan kesempatan yang sama serta melatih para BK dalam mengidentifikasi dan melakukan asesmen pada siswa berkebutuhan khusus di sekolah.

Dengan jumlah peserta tersebut, ini mengisyaratkan bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan mendapat sambutan yang positif dari sasaran pengabdian. Atas kondisi tersebut maka ke depannya jika mendapatkan kesempatan pengabdian kepada masyarakat kembali akan dipersiapkan untuk target peserta yang lebih besar lagi.



Gambar 1. Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat

Secara khusus kegiatan pengabdian ini membekali para Guru BK Kota Binjai dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang positif dalam upaya menyiapkan pendidikan inklusif di sekolah masing-masing. Selama proses pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme yang tinggi dari para peserta kegiatan yang serius dan seksama membahas dan mengkaji materi yang dipaparkan. Beberapa pertanyaan yang muncul juga mengisyaratkan keingintahuan yang tinggi akan upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Dalam kurun waktu pelaksanaan program kemitraan masyarakat ini, semua tahapan kegiatan pengabdian ini tercapai, untuk hal itu maka rencana tahapan kegiatan pengabdian selanjutnya mengarah kepada dua kondisi, yaitu evaluasi proses pelaksanaan dan evaluasi akhir.

Pada kegiatan evaluasi proses program kemitraan masyarakat, diketahui bahwa: (1) pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan dengan baik tanpa kendala, (2) Narasumber sangat menguasai materi mengenai anak berkebutuhan khusus dan pembelajaran inklusif, (3) Materi Kegiatan sangat bermanfaat bagi Guru BK, (4) Sarana dan Prasarana baik. Evaluasi program kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai dan mengukur sejauh mana kebermanfaatan program kegiatan pengabdian yang dilaksanakan terhadap sasaran kegiatan pengabdian.

Pada evaluasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi khusus dilakukan terhadap peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadi sasaran. Monitoring dan evaluasi difokuskan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap peserta kegiatan atas materi kegiatan pengabdian yang didapatkan. Keberhasilan peserta kegiatan diukur melalui pemahamannya mengenai ragam dan jenis anak berkebutuhan khusus dan identifikasi anak berkebutuhan khusus, instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus, asesmen anak berkebutuhan khusus, instrumen asesmen anak berkebutuhan, prosedur identifikasi dan asesmen, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan guru BK dalam merancang dan mengembangkan Program Rintisan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di Kota Binjai.

4. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kegiatan program kemitraan masyarakat Rangkul Abk: Program Rintisan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Di Kota Binjai berhasil. Hal ini dilihat dari ketercapaian target peserta kegiatan, ketercapaian target materi kegiatan dan ketercapaian tujuan kegiatan. Selain itu dapat dilihat animo dan antusiasme sasaran kegiatan program kemitraan masyarakat sangat baik, hal ini ditunjukkan dari tingkat partisipasi peserta dalam hal ini siswa dan para guru sangat tinggi, diskusi dan tanya jawab yang sangat konstruktif dan kooperatif.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Bahwa karena animo dan antusiasme yang tinggi dari peserta, maka untuk kegiatan yang akan datang dimungkinkan lebih banyak guru berbagai sekolah yang menjadi sasaran kegiatan dan diadakannya kegiatan lanjutan yang sejenis selalu diselenggarakan secara periodik sehingga dapat mengoptimalkan keterampilan guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di semua sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mudjito, D. (2012). Pendidikan Inklusif. Jakarta: Baduose Media Jakarta.
- Lukitasari. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(3), 121-134.
- Setianingsih. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusi: Manajemen Tenaga Kependidikan. *Jurnal Malih Pendas*, 126-135.

- Smith, D. (2015). Sekolah untuk Semua (Teori dan Implementasi Inklusi). Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah. (2013). Penyiapan Tenaga Kependidikan dalam Kerangka Pendidikan Inklusif. Surabaya: Makalah Temu Ilmiah Nasional
- Roux-Marson, C., Baranski, J. B., Fafin, C., Exterman, G., Vigneau, C., Couchoud, C., Moranne, O., & Investigators, P. S. P. A. (2020). Medication burden and inappropriate prescription risk among elderly with advanced chronic kidney disease. *BMC Geriatrics*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-020-1485-4>
- Sagnelli, C., Gentile, V., Tirri, R., Macera, M., Cappabianca, S., Ciccia, F., & Coppola, N. (2020). Chronic conventional disease-modifying anti-rheumatic drugs masking severe SARS-CoV-2 manifestations in an elderly rheumatic patient. In *Journal of Infection* (Vol. 81, Issue 6, pp. 979–997). <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.05.043>
- Sismulyanto. (2021). *The Butterfly System of Nursing Community* (N. M. Adiutama (ed.); 1st ed.). Ahlimedia Press.
- Tinnirello, A., Mazzoleni, S., & Santi, C. (2021). Chronic pain in the elderly: Mechanisms and distinctive features. *Biomolecules*, 11(8). <https://doi.org/10.3390/biom11081256>
- Ublosakka-Jones, C., Tongdee, P., Pachirat, O., & Jones, D. A. (2018). Slow loaded breathing training improves blood pressure, lung capacity and arm exercise endurance for older people with treated and stable isolated systolic hypertension. *Experimental Gerontology*, 108, 48–53. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2018.03.023>